

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggambarkan pendekatan penelitian dengan menerapkan metode deskriptif dan verifikatif dengan penelitian studi empiris. Tujuan dari pendekatan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.

Adapun definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut:

“Suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel” (Sugiyono, 2017).

Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu akuntabilitas publik, transparansi dan kinerja pemerintah daerah.

Pendekatan verifikatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Pendekatan verifikatif ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen atau adanya hubungan antar variabel. Pada penelitian ini, pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji besarnya pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten tahun 2022.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian pada umumnya adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data yang dikaji dalam penelitian, dengan demikian objek penelitian merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Karena pada hakikatnya, objek penelitian menjadi sasaran untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian merupakan objek yang akan diteliti, dianalisis, dan dikaji.

Adapun definisi objek penelitian adalah sebagai berikut:

“Sesuatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal subjektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)” (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten tahun 2022.

3.3 Variabel dan Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mulai mengumpulkan data. Definisi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

“Atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek dalam bidang keilmuan atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dikaji, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulannya untuk memperoleh hasil penelitian tersebut” (Sugiyono, 2017)

3.3.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent*) merupakan variabel yang dapat memengaruhi variabel lainnya atau sebagai sebab dari perubahan timbulnya variabel terikat. Adapun definisi variabel independen adalah sebagai berikut:

“Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predicator*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas” (Sugiyono, 2017).

Penelitian yang dilakukan penulis ini variabel bebas atau variabel independennya adalah Akuntabilitas (X_1) dan Transparansi (X_2).

1. Akuntabilitas Publik

Definisi Akuntabilitas Publik dalam Peraturan Pemerintah No.

71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta objektif instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP.

2. Transparansi

Definisi Transparansi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Transparansi adalah sebagai berikut:

“Transparansi yaitu bentuk pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh agen secara terbuka kepada publik atas dasar bahwa publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara terbuka dari pemerintah atas pengelolaan sumber daya dengan mematuhi seluruh aturan yang berlaku.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator:

1. Ketepatan Waktu;
2. Keteraksesan.

3.3.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel independen (bebas). Adapun definisi variabel dependen adalah sebagai berikut:

“Variabel dependent sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas” (Sugiyono, 2017)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

Kinerja Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

“Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.”

Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD terdiri atas:

1. Evaluasi kinerja makro, dilakukan dengan menilai:
 - a. Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD; dan
 - b. Perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD
2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.3.3 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terikat dalam penelitian ini. Di samping itu, tujuan dari operasionalisasi variabel yaitu untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan tepat. Macam-macam skala pengukuran dapat berupa: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval dan rasio (Sugiyono, 2017).

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” maka terdapat tiga variabel penelitian, operasional variabel dalam penelitian ini terdapat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Akuntabilitas Publik (X_1)	<p>Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.</p> <p>(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)</p>	<p>Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), komponen pengukuran meliputi: 1) perencanaan kinerja; 2) pengukuran kinerja; 3) pelaporan kinerja; dan 4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</p>	Interval
Transparansi (X_2)	<p>“Transparansi yaitu bentuk pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh agen secara terbuka kepada publik atas dasar bahwa publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara terbuka dari pemerintah atas pengelolaan sumber daya dengan mematuhi seluruh aturan yang berlaku.”</p> <p>(Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)</p>	<p>Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator: 1) Ketepatan Waktu; dan 2) Keteraksesan.</p> <p>(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)</p>	Rasio
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	<p>“Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan</p>	<p>Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, komponen pengukuran</p>	Rasio

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
	pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.” (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	meliputi: 1) Tingkat capaian kinerja; dan 2) Kesesuaian materi (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	

3.4 Populasi Penelitian

Peneliti diharuskan untuk menentukan populasi yang akan menjadi objek atau subjek penelitian. Kata populasi sendiri dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu (pengamatan). Adapun definisi populasi adalah sebagai berikut:

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Provinsi Banten terdiri atas 4 kabupaten dan 4 kota dengan periode Tahun 2022.

Tabel 3. 2
Populasi Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota	No	Nama Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bandung	19	Kota Bandung
2	Kabupaten Bandung Barat	20	Kota Banjar
3	Kabupaten Bekasi	21	Kota Bekasi
4	Kabupaten Bogor	22	Kota Bogor
5	Kabupaten Ciamis	23	Kota Cimahi
6	Kabupaten Cianjur	24	Kota Cirebon

No	Nama Kabupaten/Kota	No	Nama Kabupaten/Kota
7	Kabupaten Cirebon	25	Kota Depok
8	Kabupaten Garut	26	Kota Sukabumi
9	Kabupaten Indramayu	27	Kota Tasikmalaya
10	Kabupaten Karawang	28	Kabupaten Lebak
11	Kabupaten Kuningan	29	Kabupaten Pandeglang
12	Kabupaten Majalengka	30	Kabupaten Serang
13	Kabupaten Pangandaran	31	Kabupaten Tangerang
14	Kabupaten Purwakarta	32	Kota Cilegon
15	Kabupaten Subang	33	Kota Serang
16	Kabupaten Sukabumi	34	Kota Tangerang
17	Kabupaten Sumedang	35	Kota Tangerang Selatan
18	Kabupaten Tasikmalaya		

3.5 Teknik *Sampling* dan Sampel Penelitian

3.5.1 Teknik *Sampling*

Adapun definisi Teknik *sampling* adalah sebagai berikut:

“Teknik *sampling* adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan. Teknik *sampling* pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*” (Sugiyono, 2017).

Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *sampling* jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Definisi non probability sampling sebagai berikut:

“Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel” (Sugiyono, 2017).

Adapun definisi sampling jenuh sebagai berikut:

“Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel” (Sugiyono, 2017).

Maka dari itu, Penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 35 Kabupaten/Kota

3.5.2 Sampel Penelitian

Definisi Sampel adalah sebagai berikut:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu” (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini penulis menjadikan seluruh populasi penelitian sebagai sampel penelitian sebagaimana yang tertera dalam tabel 3.2

3.6 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017)

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini Indeks SAKIP tahun 2022 yang dipublikasikan oleh Kemenpan-RB diperoleh melalui website <https://1data.menpan.go.id/>. Data pengelolaan keuangan daerah diperoleh dari masing-masing *website* resmi pemda. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dipublikasikan oleh Kemendagri diperoleh melalui website <https://www.kemendagri.go.id/>.

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun data. Data terkait informasi akuntabilitas pemda diperoleh dari Indeks SAKIP tahun 2022 yang dipublikasikan oleh Kemenpan-RB pada website <https://1data.menpan.go.id/>. Data terkait Transparansi diperoleh melalui data pengelolaan keuangan daerah yang diperoleh dari masing-masing *website* resmi pemda. Data terkait informasi kinerja instansi pemerintah diperoleh dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dipublikasikan oleh Kemendagri pada website <https://www.kemendagri.go.id/>. Data kemudian diolah oleh peneliti dengan bantuan Microsoft Excell

3.7 Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.7.1 Analisis Data Deskriptif

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh.

Definisi analisis data adalah sebagai berikut:

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain” (Sugiyono, 2017).

Adapun definisi analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

“Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi” (Sugiyono, 2017).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan pembahasan mengenai Akuntabilitas Publik, Transparansi, dan Kinerja Pemerintah Daerah. Pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis deskriptif antara lain menggunakan nilai maksimum, nilai minimum dan nilai rata-rata (*mean*). Sedangkan untuk menentukan kategori penilaian setiap nilai rata-rata (*mean*) perubahan pada variabel penelitian, maka dibuat tabel distribusi. Dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Publik

Untuk dapat menilai akuntabilitas publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh data nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Membuat tabel pengelompokan indeks SAKIP dan Status Prestasi.
- c. Menentukan Kriteria Penilaian.

Tabel 3. 3
Kategori Nilai Akhir Akuntabilitas Publik

No	Kategori	Interval	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	7	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	6	>80-90	Memuaskan
3	BB	5	>70-80	Sangat Baik
4	B	4	>60-70	Baik
5	CC	3	>50-60	Cukup (memadai)
6	C	2	>30-50	Kurang
7	D	1	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah

2. Transparansi

Untuk dapat menilai transparansi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2020. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu penyajian. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia atau disajikan dalam Situs Jaringan Resmi Pemerintah Daerah atau Sistem informasi Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan, dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

- b. Keteraksesan. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang dikur telah tersedia untuk diakses dan diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Situs Jaringan Resmi Pemerintah Daerah atau Sistem informasi Pemerintah Daerah.
- c. Skor yang diperoleh setiap indikator dijumlahkan untuk mendapatkan skor total untuk setiap pemda.
- d. Menghitung tingkat transparansi dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh setiap indikator, kemudian dikalikan seratus.
- e. Pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Open Budget Index (OBI) yang merupakan kategori peringkat yang digunakan Internasional Budget Partnership (IBP) dalam menetapkan peringkat indeks keterbukaan anggaran di 102 negara pada tahun 2015.

Tabel 3. 4
Transparansi Menurut Open Budget Index

No	Skor	Tingkat Keterbukaan	Kategori
1	81-100	Cukup (Sufficient)	Ekstensif (Extensive)
	61-80		Substansial (Substansial)
2	41-60	Tidak cukup (Insufficient)	Terbatas (Limited)
	21-40		Minimal (Minimal)
	0-20		Sedikit (Scant or None)

Sumber: (Ritonga & Syamsul, 2016)

3. Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk dapat menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh data nilai/skor kinerja pemerintah daerah melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Menentukan Kriteria Penilaian

Tabel 3. 5
Kategori Nilai Akhir Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indeks EPPD	Prestasi
$3,00 < \text{Skor} \leq 4,00$	Sangat Tinggi (ST)
$2,00 < \text{Skor} \leq 3,00$	Tinggi (T)
$1,00 < \text{Skor} \leq 2,00$	Sedang (S)
$0,00 < \text{Skor} \leq 1,00$	Rendah (R)

Sumber: Manual Evaluasi Penyelenggaraan Daerah Tahun 2020

3.7.2 Analisis Data Verifikatif

Analisis verifikatif adalah analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode verifikatif untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab-akibat, antara variabel independen dan variabel dependen yaitu mengenai:

1. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022.
2. Seberapa besar pengaruh Transparansi terhadap Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022.

Metode analisis verifikatif ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

3.7.2.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Mengingat data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak untuk digunakan maka perlu dilakukan uji asumsi klasik.

3.7.2.1.1 Uji Normalitas

Defini Uji normalitas adalah sebagai berikut:

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan” (Ghozali, 2018).

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel independen dan variabel dependen pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah sampel yang digunakan mempunyai berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Dalam

model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Sminov* dalam program SPSS.

Adapun tujuan uji normalitas adalah sebagai berikut:

“Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik.

- a. Analisis Grafik, merupakan cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.
- b. Analisis Statistik, yang dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual” (Ghozali, 2018).

Dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu: (Ghozali, 2018)

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode grafik normal probability plots dalam program SPSS, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa modal regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Definisi Uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (bebas). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018).

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1, batas VIF adalah 10, jika nilai dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Gujarati, 2012). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: (Santoso S. , 2012)

$$VIF = \frac{1}{Tolerance}$$

$$Tolerance = \frac{1}{VIF}$$

3.7.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar)

Definisi Uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

“Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas juga bisa menggunakan uji *rank spearman* yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual hasil regresi, jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terhadap heteroskedastisitas (*varians* dari residual tidak homogen)” (Ghozali, 2018).

Ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas dalam *variance error terms* untuk model regresi yaitu metode *chart* (diagram *scatterplot*) dan uji statistik (uji glejser) (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *chart* atau diagram *scatterplot*. Dasar analisis ini dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan residual (SRESID).

Dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya dengan dasar analisis sebagai berikut:

- a. Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2018).

3.7.2.1.4 Uji Autokorelasi

Definisi uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

"Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji asumsi klasik autokorelasi dilakukan untuk data *time series* atau data yang mempunyai seri waktu, misalnya data dari tahun 2000 s/d 2012" (Sunnyoto, 2016)

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: (Sunnyoto, 2016)

$$D - W = \frac{\sum(e_t - e_{t-1})}{\sum_t e^2}$$

- a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$.
- c. Terjadi autokorelasi negatif jika DW di atas +2 atau $DW > +2$.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Uji *Durbin-Watson* untuk menguji autokorelasi. Uji *Durbin-Watson* merupakan salah satu uji yang banyak digunakan untuk untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi (baik negatif atau positif).

Tabel 3. 1
Uji *Statistic Durbin –Watson*

Nilai <i>Statistic d</i>	Hasil
$0 < d < DL$	Ada autokorelasi positif
$dL < d < du$	Ragu-ragu
$Du < d < 4-du$	Tidak ada autokorelasi positif/negatif
$4-du < d < 4-dL$	Ragu-ragu
$4-dL < d < 4$	Ada autokorelasi negatif

3.7.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda yaitu suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Adapun persamaan analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: (Sugiyono, 2017)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_nX_n + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat

a = Konstanta

$b_1 b_2 b_n$ = Koefisien Arah Garis

$X_1 X_2 X_n$ = Variabel Bebas

e = epsilon (Variabel yang tidak diteliti) *Error* / pengaruh luar

3.7.2.3 Analisis Koefisien Determinasi R²

Analisis determinasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dan variabel dependen.

Adapun definisi koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

“Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. *Coc & R Square* merupakan ukuran yang mencoba meniru R² pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan” (Ghozali, 2018)

Koefisien determinasi (Kd) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (Kd) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai Kd yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi (Kd) dapat menggunakan rumus sebagai berikut: (Sugiyono, 2017)

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r² = Koefisien kuadrat korelasi ganda

Semakin kecil nilai r^2 menunjukkan terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai r^2 semakin besar berarti informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen hampir seluruhnya dapat diberikan oleh variabel independent.

3.7.2.4 Uji Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh positif antara variabel independen yaitu Akuntabilitas dan Transparansi terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variabel dependen. Dengan pengujian hipotesis ini, penulis menetapkan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis nol (H_0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t (Uji Parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam pengujian hipotesis ini peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Masing-masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan

dengan t tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Persamaan regresi akan dinyatakan berarti/signifikan jika t signifikan lebih kecil sama dengan 0,05.

Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jika $\text{Sig} > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika $\text{Sig} \leq 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Bila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Sedangkan penolakan H_0 menunjukkan terdapat pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk pengujian parsial digunakan rumus hipotesis sebagai berikut:

$H_{01} (\beta_1 \leq 0)$: Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

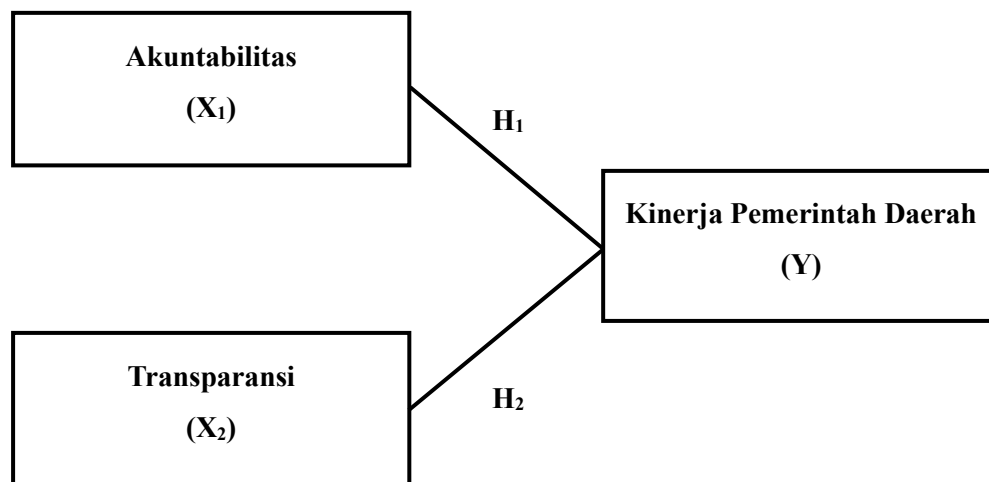
$H_{a1} (\beta_1 > 0)$: Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

$H_{02} (\beta_2 \leq 0)$: Transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

$H_{a2} (\beta_2 > 0)$: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.8 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi, yaitu “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Tahun 2022)” dengan dilakukannya uji hipotesis yaitu dengan uji t (parsial). Maka untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen, Penulis memberikan model penelitian yang dinyatakan pada gambar 3. 1 berikut:



Gambar 3. 1
Model Penelitian